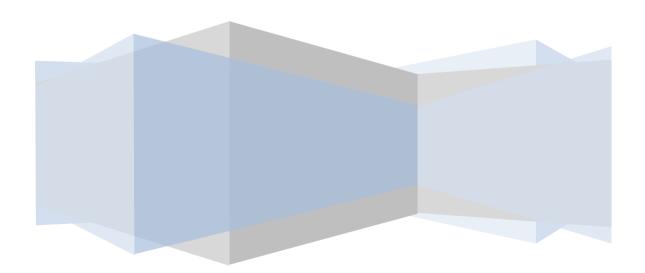
# PENGADILAN AGAMA GRESIK LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2018** 





# LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK

# **Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018**

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik

Telp. (031) 3991193 Fax. 031 (3981685)

Gresik - Jawa Timur 61121

e-mail: pagresik@gmail.com

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 151.108.900- atau mencapai 109,63 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 137.835.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp 65.700.000,-atau mencapai 98,06 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 67.000.000,-.

#### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 10.715.620,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 10.715.620; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 10.715.620,-.

#### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos biasa. dan luar surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 151.108.900,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 72.025.524,- sehingga terdapat Defisit dari senilai Rp 79.083.376,-. Surplus Kegiatan Non Kegiatan Operasional Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 347.304 dan sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 79.430.680,-.

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 8.299.290,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 79.430.680,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp (77.014.350),- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 10.715.620.

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan	Perubahan	Ekuitas	untuk	Tahun	2018	disusun	dan	disajikan
	asis akrual.							
APORAN	KEUANGAN P	ENGADIL	AN AGAI	MA GRES	IK 201	8	_	Page - 3 -

# PENGADILAN AGAMA GRESIK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2	TA 2018		TA 2017
ORAIAN	CATATAN	ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	137,835,000	151,108,900	109.63	146,173,960
JUMLAH PENDAPATAN		137,835,000	151,108,900	109.63	146,173,960
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	-
Belanja Barang	B.4	67,000,000	65,700,000	98.06	19,000,000
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		67,000,000	65,700,000	98.06	19,000,000

#### PENGADILAN AGAMA GRESIK NERACA PER 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	_	-
Persediaan	C.10	10,715,620	8,299,290
Jumlah Aset Lancar		10,715,620	8,299,290
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	_	_
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	_	_
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	_	_
Jumlah Piutang Jangka Panjang	0.15	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14		
Peralatan dan Mesin	C.14 C.15	<del>-</del>	=
		-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		10,715,620	8,299,290
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	_	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	_	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	_	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	_	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	10,715,620	8,299,290
JUMLAH EKUITAS		10,715,620	8,299,290
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10,715,620	8,299,290

# PENGADILAN AGAMA GRESIK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL	CATATAN	2010	2017
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	151,108,900	146,173,960
JUMLAH PENDAPATAN	2.12	151,108,900	146,173,960
			_ 10,_ 10,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	6,325,524	262,650
Beban Barang dan Jasa	D.4	49,700,000	3,000,000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	16,000,000	16,000,000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		72,025,524	19,262,650
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		79,083,376	126,911,310
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		347,304	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		79,430,680	126,911,310
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		79,430,680	126,911,310

# PENGADILAN AGAMA GRESIK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	8,299,290	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	79,430,680	126,911,310
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	E.3		
EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1		_
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	L.J.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(77,014,350)	(118,612,020)
EKUITAS AKHIR	E.5	10,715,620	8,299,290

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Gresik

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik

Pengadilan Agama Gresik mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Gresik berkomitmen dengan visi "Terwujudnya Peradilan Pengadilan Agama Gresik Yang Agung" Untuk mewujudkannya dilakukan beberapa langkahakan langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia yaitu dengan mengikut sertakkan seluruh aparat Pengadilan Agama Gresik untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
  - 2. Membangun Budaya Kerja Profesional yaitu dengan menghilangkan kesan Bodoh Penghasilan Sama (PGPS).
  - 3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi yaitu meningkatkan

akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Gresik sehingga kebutuhan publik informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi Pengadilan, standar prosedur berpekera serta informasi mudah lainnya menjadi danmurah. 4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan yaitu syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obvektif adalah adanya kemandirian lembaga yang enyelenggarakan perdilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga ( kemandirian institusional ). serta kemandirian hakim dalam menjalanka fungsinya (kemandirian individual fungsional )

- 5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan yaitu Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak badan peradilan.
- 7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Gresik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian

#### Keuangan

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.3. Basis Akuntansi

### Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Gresik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan.

### Dasar Pengukuran

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Gresik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Gresik. Disamping itu, dalam penyusunannya diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat

di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut:

#### (1) Pendapatan- LRA

### Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### (2) Pendapatan- LO

## Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - o Pendapatan Denda diakui pada saat

dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### (3) Belanja

#### Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4) Beban

#### Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;
   terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

#### Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta

#### jumlahnya bisa diukur dengan andal

• Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan realizable (net value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Perhitungan penyisihannya pemerintah. adalah sebagai berikut:

IZ1:4	Iluaion	Donrrigiban
Kualitas	Uraian	Penyisihan
Piutang		
T	Belum dilakukan pelunasan	0 50/
Lancar	s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
	Satu bulan terhitung sejak	
Kurang	tanggal Surat Tagihan	1.00/
Lancar	Pertama tidak dilakukan	10%
	pelunasan	
	Satu bulan terhitung sejak	
Dina malaan	tanggal Surat Tagihan Kedua	E00/
Diragukan	tidak dilakukan pelunasan	50%
	_	
	1. Satu bulan terhitung sejak	
	tanggal Surat Tagihan Ketiga	
	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	2. Piutang telah diserahkan	100%
	kepada Panitia Urusan	
	_	
	Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

#### Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

 Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### c. Penyusutan Aset Tetap

## Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
   Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa
   memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa

Manfaat.

 Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongar	1///	Vanfaat	100+	Totan
renggolongar	i masa n	viarijaai.	Asei	retup

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### e. Aset Lainnya

Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.
 Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang

- dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

#### Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

# B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Gresik* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

	201	8	
Uraian	ANGGARAN	ANGGARAN	
	AWAL	SETELAH REVISI	
Pendapatan			
Pendapatan Jasa	0	-	
Pendapatan Lain-lain	137.835.000	-	
Jumlah Pendapatan	137.835.000	-	
Belanja			
Belanja Pegawai	0	•	
Belanja Barang	67.000.000	-	
Belanja Modal	0	-	
Belanja Bantuan Sosial	0		
Jumlah Belanja	67.000.000	0	

#### **B.1 Pendapatan**

Realisasi
Pendapatan Rp
151.108.900,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 151.108.900,-atau mencapai 109,63 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 137.835.000,-. Pendapatan Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

		2018	
Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	137,835,000	151,108,900	109.63

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2018 mengalami kenaikan (3,38) persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena perkara yang masuk lebih banyak di Tahun 2018

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0.00
Pendapatan Lain-lain	151,108,900	146,173,960	3.38
Jumlah	151,108,900	146,173,960	3.38

#### **B.2** Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp 65.700.000,- Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp 65.700.000,- atau 98,06% dari anggaran belanja sebesar Rp 67.000.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

	2018		
Uraian	Anggaran Realisasi		% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	67,000,000	65,700,000	98.06
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	67,000,000	65,700,000	98.06
Pengembalian		-	-
Jumlah	67,000,000	65,700,000	98.06

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 245,79% dibandingkan tahun 2018 dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada pos bantuan hokum ( Pos bakum ).

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	•
Belanja Barang	65,700,000	19,000,000	245.79
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	65,700,000	19,000,000	245.79

#### B.3 Belanja Pegawai

### Belanja Pegawai Rp 0

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNSsebagai imbalan atas pekerjaan telah yang dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 tidak mengalami penurunan/kenaikan sebesar 0,- persen dari TA 2017.

#### Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %			
	NIHIL					
Jumlah Belanja	Jumlah Belanja					

#### **B.4** Belanja Barang

Belanja Barang Rp 65.700.000,- Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 65.700.000,- dan Rp 19.000.000,-. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan 245,79% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya belanja jasa berupa belanja jasa konsultan sepanjang tahun 2018.

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	3,000,000	-
Belanja Perjalanan Dinas Kota	16,000,000	16,000,000	-
Belanja Perjalanan Biasa	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	-
Belanja Jasa	46,700,000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	65,700,000	19,000,000	245.79
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	65,700,000	19,000,000	245.79

#### **B.5** Belanja Modal

Belanja Modal Rp

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2017 disebabkan oleh tidak ada anggaran belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
NIHIL			

#### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp. 0 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi tersebut pada TA 2018 tidak mengalami kenaikan/penurunan persen dibandingkan TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	Naik (Turun) %	
NIHIL				

#### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Perlatan dan Mesin Rp. 0 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar Rp 0, mengalami kenaikan/penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp 0.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %	
NIHIL				

#### B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 0 Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal TA 2018 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Realisasi TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
NIHIL			

#### B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal TA 2018 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Realisasi TA 2017.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	Naik (Turun)
NIHIL			

#### B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp.0 Realisasi Belanja Modal Lainya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Realisasi TA 2017.

#### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial Rp 0 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2018 tidak mengalami dibandingkan TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
	NIHIL		

#### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.Rincian Kas di Bendahara Pengeluaranadalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	0
	-	

#### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah		

#### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 0 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

#### **4 Piutang PNBP**

Piutang PNBP Rp 0 Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0. dan Rp 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang diberikan belum diselesaikan telah namun **PNBP** pembayarannya. Rincian Piutang disajikan

#### disajikan sebagai berikut:

#### Rincian Piutang PNBP TA 2018 dan 2017

Uraian	TH 2018	TH 2017
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

# 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp 0 Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2018 dan 2017

No	Nama	TH 2018	TH 2017	
NIHIL				
	Jumlah	-	-	

#### C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp 0 Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2018 dan 2017

No	Nama	TH 2018	TH 2017	
	NIHIL			
	Jumlah -		-	

#### C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2018 dan 2017

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
	•		
	NIHIL		

#### C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp 0

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017	
NIHIL			
Jumlah	-	-	

#### C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp 0 Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017	
NIHIL			
Jumlah	-		

#### C.10 Persediaan

Persediaan Rp 10.715.620,- Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masingmasing adalah sebesar Rp 10.715.620,- dan Rp 8.299.290,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	10,715,620	8,299,290
Barang untuk Pemeliharaan	-	•
Suku Cadang	-	
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	10,715,620	8,299,290

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp 10.715620,- berada dalam kondisi baik dan disajikan dalam Persediaan.

# C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR Rp 0 Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 2017 masingmasing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2018 dan 2017

No	Debitur	TH 2018	TH 2017		
	NIHIL				
		<u> </u>			
	Jumlah	-	-		

## C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Rp 0 Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2018 dan 2017

No	Debitur	TH 2018	TH 2017		
	NIHIL				
	Jumlah	-	-		

## C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp 0

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2018 adalah masingmasing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang

Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2018

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai	
Piutang	Jk Panjang	Penyisihan	Penyisihan	
Tagihan TP/TGR				
NIHIL				
Jumlah	-		-	
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-	

#### C.14 Tanah

Tanah Rp 0 Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2018	0		
Mutasi tambah:			
Pembelian	0		
Mutasi kurang:			
Revaluasi aset	-		
Penyitaan pengadilan	0		
Saldo per 31 Desember 2017	0		

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2018

No	Luas	Lokasi	Nilai		
	NIHIL				
	Jumlah -				

#### C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp 0 Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	0
Nilai Buku per 31 Desember 2018	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

## C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp 0 Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

## C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp 0 Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

## C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp 0 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0
Nilai Buku per 31 Desember 2018	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

## C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0 Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

### C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutanselain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2018 dan 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
1					
2	MILLII				
3	NIHIL				
4					
	Akumulasi Penyusutan 0 0				

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud Rp 0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapuraberupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

RincianAset Tak berwujud TA 2018

Uraian	Nilai Perolehan	
NIHIL		
Jumlah	180,000,000	

#### C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp 0 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2018	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

## C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
	NIHIL		

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

## C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp 0 Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

## C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 0 Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

RincianUtang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan	
NIHIL			
Total			

## C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp 0 Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
NIHIL	
Total	-

## C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp 0 Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TH 2018	TH 2017	
NIHIL			
Jumlah	-	-	

#### C.28 Ekuitas

Ekuitas Rp 0 Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masingmasing sebesar Rp 10.715.620,- dan Rp 8.299.290,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut

tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

## D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp 151.108.900, Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 151.108.900,- dan Rp 146.173.960,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	83,535,300	75,059,000	11
Pendapatan Lain-lain	67,573,600	71,114,960	(5)
Jumlah	151,108,900	146,173,960	3

## D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp 0

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNSsebagai imbalan pekerjaan yang telah dilaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
NIHIL			
Jumlah	0	0	0

#### D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp 6.325.524,-

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 6.325.524,- dan Rp 262.650,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yangdipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	262,650	0
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	0	262,650	0

## D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp 49.700.000,- Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 49.700.000,- dan Rp 3.000.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	3,000,000	0.00
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0.00
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0.00
Beban Jasa Konsultan	46,700,000	0	0.00
Beban Jasa Profesi	0	0	0.00
Beban Jasa Lainnya	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
Jumlah	49,700,000	3,000,000	1556.67

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Rp16.000.000,-

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah Pemeliharaan masing-masing sebesar Rp 16.000.000,- dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

### Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp 16.000.000 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rр 16.000.000 dan Rp 16.000.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh berkurangnya beban barang non operasional lainnya. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,000,000	16,000,000	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0.00
Jumlah	16,000,000	16,000,000	-100.00

## D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp 0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp 0 Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2018 dan 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	•	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	٠	•
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	•	•
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	•	•
Jumlah Penyusutan	-	•	•
Beban Amortisasi Software	-	•	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	•	•	•
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

## D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

## **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 347.304,-dan Rp. 0,- terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 201	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	347,304	0	0.00
Beban Barang dan Jasa	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0.00
Jumlah Beban Operasional	0	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	347,304	0	0.00

#### D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp 0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAK (TURUN) %	
NIHIL				
Jumlah	0	0	0.00	

## PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp 8.299.290,- Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 8.299.290,- dan Rp 0.

## E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO Rp 79.430.680,-* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 79.430.680,dan Rр 126.911.310,-. LO Defisit merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan operasional, dan pos luar biasa.

## E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp 0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp 0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	_
Jumlah	-

## E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

## E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp 0 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

#### E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp 0 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

#### Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	1
Koreksi Pendapatan	1
Koreksi Piutang	1
Koreksi Kewajiban	1
Koreksi Hibah	1
Jumlah	-

#### E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp (77.014.350),- Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-(77.014.350), masing sebesar Rр dan Rр (118.612.020), -.Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(151,108,900)
Ditagihkan ke Entitas Lain	65,700,000
Transfer Masuk	8,394,550
Transfer Keluar	•
Pengesahan Hibah Langsung	ı
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2,416,330

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

## E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari entitas lain (DDEL)/ ditagihk an ke entitas lain (DKEL) Rp. (151.108.900),-

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp (151.108.900),- sedangkan DKEL sebesar Rp 44.600.000,-

### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk/transf er keluar Rp. 0 Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		
3	Persediaan		-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 yang merupakan transfer Persediaan kepada Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi.

# E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung dan pengembalian hibah langsung Rp. 0 Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0-. dari total Rp 0,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah	
	NIHIL			

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2018 disajikan pada lampiran.

#### E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp 10.715.620,- Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 10.715.620,- dan Rp 8.299.290,-

#### A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

## F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada

#### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Nomor: 009/BALAP.5/2016 Pelaporan Keuangan Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor:018/BALAP.5/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan Melakukan Tindakan untuk Yang Mengakibatkan Belanja/Penanggung Pengeluaran Anggaran Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 31 Desember 2018 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

#### Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : Hj. Mudjiati, SH

Pejabat Pembuat Komitmen : MOCHAMAD ISCHAQ, S.H

PejabatPenandatangan/ : KHIFIYAH. S.Sos

Penguji SPM

Bendahara : R. KHAIRANI

## Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran : MUCHAMAD ISCHAQ, S.H.

Pejabat Pembuat Komitmen : SITI SOPIYAH, S.Si

PejabatPenandatangan/ : KHIFTIYAH, S.Sos

Penguji SPM

Bendahara : R. KHAIRANI

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

## PENGADILAN AGAMA GRESIK Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku	
Manfaat	Milai Perolenan	Per 30-06-2018 Tahun 2018		Per 30-06-2018	Per 30-06-2018	
-	0	-	•	-	-	
	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
	0	-	-	-	-	
0	0	-	-	-	-	
	0				-	
0	0	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	
	0	-	-	-	-	
	-	-	•	-	-	

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

# PENGADILAN AGAMA GRESIK DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA PER 31 Desember 2018

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk	Sumber	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
NO	Nama Pemben Hiban	Hibah	Dana			Nilai	Ket.
	NIIII.						
	- NIHIL						
	Jumlah			Rp -	Rp -	Rp -	